

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah otonom memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan semua sektor pembangunan yang berada di wilayah kabupaten / kota tersebut yang dimana hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum di Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000. Untuk melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten/kota berjalan diatas kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga arah pembangunan tetap terjaga pada satu tujuan yaitu Tujuan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, untuk menjalankan roda pembangunan didaerah tersebut maka dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengacu kepada tiga fungsi pemerintahan daerah yaitu melakukan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan tugas pelayanan masyarakat.

Kota Palembang adalah salah satu kota yang berupaya untuk melaksanakan tugas daerah otonom, tercermin dari telah terintegrasinya kebijakan, standar, prosedur terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

“Kota Palembang merupakan salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya, hal ini dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkot Palembang sebanyak 8 kali secara berturut-turut, maka dari itu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sangat mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini disampaikan Anggota V BPK RI, Isma Yatun pada acara Sosialisasi Peran BPK dan DPR Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, di Hotel Aston Palembang, Kamis (11/4/2019).”

(BAKOHUMAS, 11 April 2019) - <http://www.bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/8-kali-sabet-opini-wtp-bpk-ri-apresiasi-pemkot-palembang>, diakses Juli 2019)

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, pemerintah daerah memberdayakan berbagai sumber dana baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi maupun Dana Bagi Hasil yang harus dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut dalam hal ini adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat luas.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pengendalian, selanjutnya dapat dilihat dari seberapa besar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mampu melaksanakan elemen - elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan meliputi akuntabilitas keuangan daerah, transparansi dan *value for money*. Tiga variabel ini dapat dijadikan ukuran terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan tersebut harus diikuti pula keberhasilan dalam pencapaian target pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang dikembangkan oleh kepala daerah ketika ia akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan diiringi dengan sejalanannya pula upaya mendukung program dan tujuan pembangunan nasional. Melihat dari penjelasan tersebut, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik tersebut harus memiliki ukuran standar pengelolaan dan standar ketercapaian sasaran target pembangunan dan inilah yang lazim disebut dengan istilah Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Dalam rangka menciptakan *good governance* dengan akuntabilitas publik yang baik, maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan harus diupayakan sesederhana mungkin sehingga mudah untuk dianalisis keterukurannya (*accountable*), dan dapat diakses dengan mudah (transparan) oleh publik, untuk itu dikembangkanlah format yang lebih sederhana pada setiap variabel namun tetap sesuai dengan sistem dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah

yang baku, selain itu, dalam mewujudkan kinerja anggaran, maka satuan perangkat kerja daerah harus dapat memanfaatkan dana sebaik mungkin dengan konsep *Value for Money* (VFM) yang berorientasi pada kepentingan publik, serta mempercayakan pengelolaan keuangan kepada staff yang profesional, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. *Value for Money* (VFM) ini lah yang merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (*tangible output*), tetapi kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (*intangibile output*). Target capaian anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran daerah harus dimonitor secara periodikal dengan membandingkan antara capaian dengan target anggaran, serta membandingkan dengan persentase target capaian tahun sebelumnya.

Kajian yang serupa yang dilakukan oleh Syahputra, Ricky Ary tahun 2018 yang mengangkat tentang Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value for Money*, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kab. Labuhan Batu) menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Kajian lain yang serupa yang dilakukan oleh Redi Antonius Nababan, Marlon Sihombin, dan Husni Thamrin tahun 2018 mengangkat tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Dairi mengasilkan bahwa seluruh variabel berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap pengelolaan keuangan berkonsep *value for money* di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu : **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?
2. Bagaimanakah pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dalam prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money*. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah, penulis memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* secara parsial terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* secara simultan terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Palembang, dapat dijadikan masukan dan informasi tentang penerapan konsep Akuntabilitas, Transparansi, dan *Value for Money* dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Palembang
2. Sebagai masukan yang dapat dijadikan rujukan di dalam membuat kebijakan guna peningkatan kinerja pegawai Unit Akuntansi & Keuangan secara transparan, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan ekonomis.
3. Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan akuntabilitas, trnsparansi, dan *value for money* dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

1.4.2.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian tentang akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya